

**Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pengelolaan Barang
Milik Daerah pada Pemerintah Kota Palembang**

Putri Mediana Sari^{1*}, Maria², Siska Aprianti³

Politeknik Negeri Sriwijaya

putrimediana66@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of apparatus competency, information systems (SIMDA-BMD) and governance on the quality of regional property management in the Palembang City Government. This research uses primary data from a questionnaire distributed to 32 Regional Apparatus Organizations in the City of Palembang. The number of samples taken in this research was 96 respondents. Samples were taken using purposive sampling technique. The analysis technique used is multiple linear regression using SPSS version 27 software. The results of this research provide partial or simultaneous evidence. apparatus competency, information systems (SIMDA-BMD), and governance have a positive and significant influence. Simultaneously these three factors contributed 68.2%.

Keywords: Apparatus Competence, Information Systems (SIMDA-BMD), Governance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi Aparatur, Sistem informasi (SIMDA-BMD) dan Tata Kelola terhadap Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan data Primer kuesioner yang disebarakan pada 32 Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang. Jumlah sampel yang diambil pada penelitian ini sebanyak 96 responden. Sampel diambil menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan *software* SPSS versi 27. Hasil Penelitian ini menjadi bukti secara parsial maupun simultan. kompetensi aparatur, sistem informasi (SIMDA-BMD), dan tata Kelola berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan ketiga faktor ini berkontribusi sebesar 68,2%.

Kata Kunci: Kompetensi Aparatur, Sistem Informasi (SIMDA-BMD), Tata Kelola

PENDAHULUAN

Pengelolaan Barang Milik Daerah mendapatkan peran yang sangat strategis sebagai salah satu indikator penting dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan daerah, Pentingnya kerangka pengelolaan aset di sektor publik pada pemerintah daerah telah diakui dan disadari di seluruh dunia, penerapannya tidaklah bersifat sederhana karena banyak permasalahan yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah. Pelaksanaan Pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kota Palembang masih terdapat koreksi atas nilai aset di setiap tahun.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 pasal 1 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjelaskan bahwa barang milik daerah adalah semua

barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh melalui pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang berasal dari perolehan lain yang sah. Pengelolaan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan Negara/Daerah yang merupakan perubahan dari peraturan sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 27. Tahun 2014. Peraturan ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk menjamin kemandirian pengelolaan aset daerah dan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Daerah. Peraturan tersebut mengatur mengenai wewenang, tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan barang dan kegiatan pengelolaan barang.

Permasalahan pada pengelolaan barang milik daerah hingga kini masih merupakan masalah utama pada pengelolaan keuangan daerah dalam lingkup pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh perlakuan terhadap pengelolaan barang milik daerah yang belum sesuai atau belum tertib pada peraturan yang berlaku (Utami et al., 2019). permasalahan dalam hal yang berkaitan dengan kualitas pengelolaan barang milik daerah dapat menjadi sorotan terhadap apa yang menjadi suatu faktor dari tujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah. Segala permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah harus segera diselesaikan, meskipun belum sempurna, karena barang milik daerah adalah kekayaan yang harus dijaga, dilindungi, dan dimanfaatkan sebak mungkin sebagai amanah yang diberikan kepada masyarakat (Paranga & Julessi, 2020).

Salah satu penyebab permasalahan dalam pengelolaan barang milik daerah terjadi, disebabkan oleh lemahnya kompetensi aparatur daerah yang kurang berkualitas sebagai kunci penggerak yang mampu menggerakkan pemerintahan menjadi berkembang dan melakukan pekerjaannya dengan efektif dan efisien, yang berpengaruh terhadap pengembangan dan pengoptimalan pemanfaatan barang milik daerah demi, menunjang Operasional pelaksanaan Pemerintahan sampa dengan Optimalisasi Pendapatan Asli daerah yang mana kedua hal tersebut sama-sama di peruntukan semata-mata pelayanan tugas dan fungsi instansinya terhadap Masyarakat, (Rahmadhani & Ariani, 2022). kompetensi aparatur Menurut, (Listiani & Agustin, 2022) Sumber daya manusia (SDM) merupakan hal yang paling penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Kualitas atau kemampuan aparatur didefinisikan sebagai meningkatnya kemampuan aparatur daerah untuk menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Sean pada kompetensi aparatur, dilihat pada pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah juga memerlukan suatu alat untuk memberikan informasi penting secara akurat, Mengingat peran laporan keuangan dalam memberikan informasi tentang pelaksanaan APBN/APBD yang mempengaruhi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan perekonomian nasional yang sehat, Oleh karena itu, dalam pengelolaan atas barang milik daerah telah dibuatkan sebuah sistem yang diberi nama Sistem Informasi Manajemen Daerah atau disebut SIMDA-BMD (Rahmadhani & Ariani, 2022).

Penerapan sistem informasi manajemen SIMDA-BMD. di setiap Instansi pemerintah sangat penting dalam sebuah instan pemerintahan terlebih pada fungsi

pencatatan terhadap kualitas pengelolaan barangan berbagai aktivitas lainnya (Rahmadhani & Ariani, 2022). mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun, 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, maka diterapkan sebuah teknologi informasi dengan menggunakan kecanggihan dari aplikasi teknologi komputer sebagai salah satu alat pendukung dalam sebuah sistem manajemen daerah.

Good Governance adalah sistem yang dilakukan oleh organisasi secara diarahkan dan dikendalikan, Struktur tata kelola instansi menentukan pembagian hak dan tanggung jawab di antara berbagai peserta dalam organisasi, dan menguraikan aturan dan prosedur untuk pengambilan Keputusan dan urusan instansi. Dengan melakukan hal ini, dapat juga menyediakan struktur melalui tujuan organisasi yang ditetapkan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan memantau kinerjanya (Gunawan et al., 2017). Dalam penyelenggaraan keuangan publik, *governance* didefinisikan sebagai usaha yang terdiri dari kegiatan kerja sama untuk mencapai tujuan keuangan bersama, dari kegiatan ini kemudian terciptalah kegiatan yang melibatkan orang-orang yang bekerja sama untuk kepentingan keuangan (Gunawan et al., 2017).

Pemerintahan yang baik akan berusaha mengelola barang milik daerah dengan penuh tanggung jawab, salah satu upayanya adalah dengan melakukan pengoptimalisasian terhadap pemerintah kota Palembang dimana dalam hal ini dilakukan pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) melakukan pengoptimalisasi aset daerah dan tata Kelola aset tertib dan akuntabel. tujuan dari kegiatan tersebut adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup kota Palembang, maka dengan terlaksanakannya sosialisasi tersebut dapat menjadikan semua OPD dilingkup pemerintah kota Palembang, bisa dalam memahami prosedur pemindahtanganan dan penghapusan untuk mengoptimalisasikan barang milik daerah dan dapat memanfaatkan secara ekonomis barang milik daerah yang sudah tidak digunakan, untuk di proses sesuai prosedur hukum yang berlaku berdasarkan dengan peraturan pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah (bpkad.go.id).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Listiani & Agustin, 2022), dapat dihasilkan bahwa kompetensi aparatur belum berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan barang milik daerah, hasil ini dapat menunjukan bahwa pada kompetensi aparatur masih perlu di tingkatkan pada penerapan atas pengelolaan barang milik daerah. Selanjutnya sistem informasi manajemen (SIMDA-BMD) menurut penelitian (Ricardo et al., 2022) mengatakan bahwa Sistem Informasi Manajemen tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas pengelolaan barang milik daerah. Hasil ini dapat mengidentifikasi bahwa sistem informasi manajemen SIMDA-BMD dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan barang milik daerah namun tidak signifikan, penulis tertarik untuk meneliti variabel tersebut dan untuk mengetahui bagaimana jika variabel tersebut diteiti pada objek lain. Sean itu pada tata Kelola yang di uji dalam penelitian Faisal, (2023) menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengelolaan aset. hal tersebut berarti memberikan pengaruh terhadap pengelolaan aset dengan secara positif dan signifikan pada penelitian.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan fenomena-fenomena di atas,

maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Faktor-faktor Mempengaruhi Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintahan kota Palembang”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif Seperti yang telah dijelaskan di atas penelitian kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang berlandaskan pada kuesioner yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu yang diambil secara keseluruhan. Peneliti menggunakan teknik menyebarkan kuesioner yang terkait dengan kompetensi aparatur, SIMDA-BMD, tata Kelola serta katanya dengan kualitas pengelolaan barang milik daerah.

Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Palembang dan tahun yang dijadikan dasar pengambilan data adalah tahun anggaran 2020-2022. Penelitian ini mula dilakukan dari Maret 2024 s/d selesa. Pemerintah Kota Palembang dipilih sebagai tempat penelitian dikarenakan sesuai dengan landasan fenomena yang digunakan dalam penelitian ini dan juga untuk memudahkan peneliti dalam pengumpulan data.

Populasi

Menurut Sugiyono (2022:80), “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. pengertian di atas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 32 Organisasi Perangkat Daerah di kota Palembang.

Sampel

Menurut Sugiyono (2022) sampel adalah bagian dari keseluruhan dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan di penelitian ini adalah teknik *simple random sampling* yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang menggunakan kaidah peluang dalam proses penentuan sampel.

Teknik Analisis Data

Data yang akan dianalisis yaitu data primer yang diperoleh dari 32 organisasi perangkat daerah (OPD) di kota Palembang, Total. Proses data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kuantitatif dan uji hipotesis dengan menggunakan bantuan pengolahan hasil data melalui *software* SPSS 2.7 untuk mendapatkan hasil yang akurat terhadap hasil kuesioner. Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis dengan bantuan komputer melalui program IBM SPSS 27 for Windows.

Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Uji validitas memiliki tujuan agar dapat mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu kelompok variabel. Variabel dalam pertanyaan ini umumnya mendukung suatu kelompok variabel tertentu. Setiap butir pertanyaan di uji validitas terdapat kriteria pengambilan keputusan, berupa: Jika r hitung $\geq r$ tabel maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor, maka dinyatakan valid. Jika r hitung $< r$ tabel maka instrumen atau item-item pernyataan berkorelasi signifikan terhadap total skor, maka dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reabilitas

(*reliability*) adalah suatu pengukur yang menunjukkan stabilitas dan konsistensi dari suatu instrumen yang mengukur suatu konsep dan berguna untuk mengakses kebaikan suatu pengukur, untuk menguji keandalan alat ukur atau instrumen dalam penelitian ini digunakan koefisien *Alpha Cronbach*. Koefisien keandalan menunjukkan mutu seluruh proses pengumpulan data suatu penelitian. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai koefisien *alpha* lebih besar dari 0,60 (Hartono:2015). Suatu variabel dikatakan kurang baik jika memberikan nilai koefisien *Alpha Cronbach* $< 0,60$, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik (Priyatno:2018).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Ghozali (2018:161) menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual memiliki distribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik merupakan cara termudah tetapi bisa menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel kecil. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan nilai signifikansi sebesar 5% dari jumlah sampel kecil. Penelitian ini dilakukan Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov (K-S) sebagai berikut:

- 1) Signifikansi $> 0,05$ maka data berdistribusi normal.
- 2) Signifikansi $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal

Uji Multikoloncaritas

Uji multikoloncaritas memiliki tujuan untuk menguji apakah adanya sebuah hubungan/korelasi antar variabel bebas (*independen*) pada model regresi. Dilakukan pengujian ini bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan secara linier yang sempurna atau mendekati sempurna apabila koefisien korelasinya tinggi. Untuk melihat terdapat gejala multikolonieritas atau tidak, melalui nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan toleransi. Jika VIF dinyatakan kurang dari angka 10 dan

toleran melebihi angka 0,1 dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolonieritas (Priyatno:2018)

Uji Heterodastitas

Uji heterokedastitas memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, jika varian dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastitas, dan jika berbeda disebut homoskedastik. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastik dan tidak terjadi homoskedastik. Ada beberapa uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastitas, salah satunya uji *Gleser*. Jika probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heterokedastitas (Ghozali:2018)

Model Analisis

1) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinan (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinan adalah diantara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Besar kecilnya koefisien determinasi atau R^2 (R square) dapat menandakan tingkat ketepatan suatu garis regresi.

2) Uji Hipotesis

Uji hipotesis dengan uji t digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali:2018). Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji t adalah sebagai berikut:

- Jika nilai t hitung $>$ t tabel dan nilai Sig. T $<$ $\alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika nilai t hitung $<$ t tabel dan nilai Sig. T $>$ $\alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji Validitas dimaksudkan untuk menguji valid tidaknya daftar pertanyaan dalam kuesioner penelitian dengan menggunakan kriteria nilai signifikan hitung kurang dari 0,05 dan r hitung lebih dari r tabel maka data dapat dikatakan valid

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Item pertanyaan	r _{Hitung}	r _{Tabel}	Keterangan
1.	Kompetensi Aparatur X ₁	KA1	0,792	0.2006	Valid
		KA2	0,703	0.2006	Valid
		KA3	0,801	0.2006	Valid
		KA4	0,786	0.2006	Valid
		KA5	0,710	0.2006	Valid
		KA6	0,713	0.2006	Valid
		KA7	0,732	0.2006	Valid
2.	Sistem Informasi (SIMDA-BMD) X ₂	SI 1	0,867	0.2006	Valid
		SI 2	0,915	0.2006	Valid
		SI 3	0,895	0.2006	Valid
		SI 4	0,844	0.2006	Valid
		SI 5	0,810	0.2006	Valid
		SI 6	0,876	0.2006	Valid
		SI 7	0,813	0.2006	Valid
		SI 8	0,927	0.2006	Valid
		SI 9	0,802	0.2006	Valid
3	Tata Kelola X ₃	TK1	0,667	0.2006	Valid
		TK2	0,903	0.2006	Valid
		TK3	0,924	0.2006	Valid
		TK4	0,845	0.2006	Valid
		TK5	0,845	0.2006	Valid
		TK6	0,910	0.2006	Valid
		TK7	0,891	0.2006	Valid
		TK8	0,836	0.2006	Valid
4	Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Y	TP1	0,839	0.2006	Valid
		TP2	0,853	0.2006	Valid
		TP3	0,915	0.2006	Valid
		TP4	0,871	0.2006	Valid
		TP5	0,843	0.2006	Valid
		TP6	0,919	0.2006	Valid
		TP7	0,811	0.2006	Valid
		TP8	0,802	0.2006	Valid

Sumber: Data yang diolah 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai r_{hitung} pada butir pernyataan masing-masing variabel di atas r_{tabel} . Pada variabel kompetensi aparatur, nilai r_{hitung} berkisar 0,792 sampai dengan 0,732. pada variabel sistem manajemen informasi (SIMDA-BMD) nilai r_{hitung} berkisar 0,867 sampai dengan 0,802. Pada variabel Tata Kelola nilai r_{hitung} berkisar 0,836 sampai dengan 0,836. Kemudian pada variabel kualitas pengelolaan barang milik daerah, nilai r_{hitung} berkisar 0,839 sampai dengan

0,802. Semua nilai positif dan berada di atas nilai r_{tabel} yaitu 0,2006. Hal ini membuktikan bahwa semua pernyataan valid.

Uji Reabilitas

Reabilitas dimaksudkan untuk mengukur indikator penelitian berdasarkan kuesioner yang berisi atas kumpulan pertanyaan terkait dengan variabel yang diteliti dengan kriteria jawaban atas pertanyaan harus konsisten dan stabil tanpa meskipun waktu terus berjalan dengan menggunakan metode yang digunakan untuk mengukur reabilitas adalah *Cronbach Alpha*. Suatu variabel dikatakan kurang baik apabila nilai *Cronbach Alpha* < 0,06, dapat diterima bila 0,7 dan di atas 0,8 adalah baik.

Tabel 2. Hasil Uji Reabilitas

No	Variabel	Alpha Cronbach	Batas reliabilitas	Keterangan
1	Kompetensi Aparatur	0,864	0,70	Reliabel
2	Sistem Informasi Manajemen daerah (SIMDA-BMD)	0,959	0,90	Reliabel
3	Tata Kelola	0,942	0,80	Reliabel
4	Kualitas Pengelolaan Barang Milik daerah	0,948	0,80	Reliabel

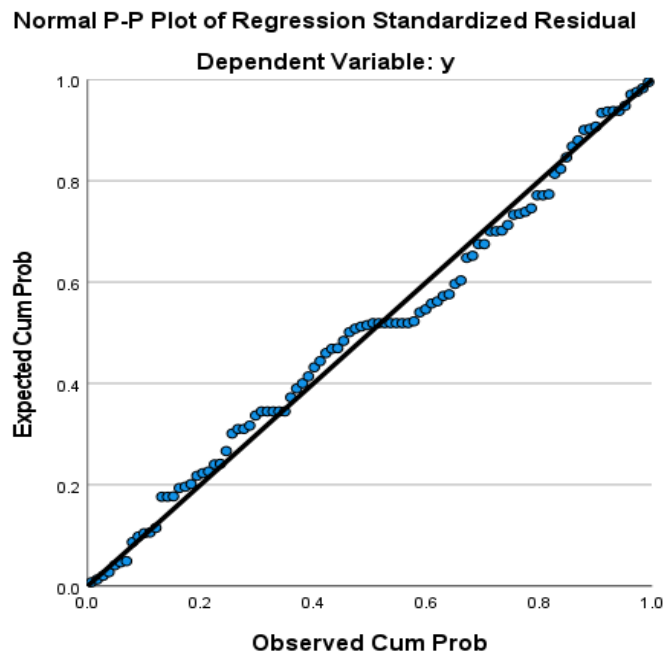
Sumber: Data yang diolah 2024

Berdasarkan tabel di atas didapat bahwa koefisien reabilitas pada variabel kompetensi aparatur adalah 0,864, sistem informasi (SIMDA-BMD) 0,959, Tata kelola sebesar 0,942, dan kualitas pengelolaan barang milik daerah sebesar 0,948. Semua nilai tersebut berada di atas 0,7, dapat disimpulkan bahwa semua item dalam penelitian ini reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas dimaksudkan untuk dapat mengetahui variabel-variabel yang diteliti mempunyai distribusi normal atau tidak dengan. Dengan kriteria syarat model regresi yang baik yakni data mendekati normal dan atau data berdistribusi normal. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan uji normalitas berupa P-P Plot of *regression Standardizes Residual* berikut:



Gambar 1. Analisis Grafik Hasil Uji Normalitas P-P Plot of Regression Standardizes Residual

Sumber: Data yang diolah 2024

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas artinya ada hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki atau tidak terjadi korelasi antar variabel independennya. Uji pada multikolinieritas dilihat dari nilai *tolerance* atau *variance inflation factor* dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinieritas antar variabel independen pada model regresi.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Coefficients ^a				Collinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.127	1.542		2.676	.009		
	x1	.322	.096	.327	3.350	.001	.363	2.758
	x2	.255	.105	.266	2.432	.017	.290	3.448
	x3	.282	.116	.301	2.420	.017	.224	4.463

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data yang diolah 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* untuk variabel X₁ adalah 0,363, nilai *tolerance* untuk variabel X₂ adalah 0,290, nilai *tolerance* untuk variabel X₃ adalah 0,224. Ketiga nilai tersebut berada diatas 0,100. Nilai VIF variabel X1 adalah 2.758, X2 3,448, dan X3 adalah 4,463. Ketiga nilai tersebut lebih kecil dari

10.000. hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolonieritas dalam model regresi ini.

Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Uji-t adalah uji yang digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Uji-t digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Hasil uji dilihat dari nilai signifikansi 0,050 serta membandingkan t hitung dengan t tabel. Jika nilai t hitung > t tabel, maka variabel X, maka secara parsial variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. nilai t-tabel pada signifikan 0,050 yaitu $df = n - k$ yaitu $96 - 1 - 1 = 94$, nilai t-tabel adalah 0,2006. Berikut adalah hasil uji-t

Tabel 4. Hasil Uji-t Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Correlations			
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	4.127	1.542		2.676	.009			
	x1	.322	.096	.327	3.350	.001	.756	.330	.197
	x2	.255	.105	.266	2.432	.017	.752	.246	.143
	x3	.282	.116	.301	2.420	.017	.782	.245	.142

a. Dependent Variable: y

Sumber: Data yang diolah 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Besar pengaruh secara parsial X_1 pada variabel kompetensi aparatur dapat dihitung berdasarkan nilai beta sebesar 0,327 dikali dengan nilai zero order sebesar 0,756.
 - $0,327 \times 0,756 = 0,247$ (24,7%)
2. Besar pengaruh secara parsial X_2 pada variabel Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA-BMD) dapat dihitung berdasarkan nilai beta sebesar 0,266 dikali dengan nilai zero order sebesar 0,752 .(2%)
 - $0,266 \times 0,752 = 0,200$
3. Besar pengaruh secara parsial X_3 pada variabel Tata Kelola dapat dihitung berdasarkan nilai beta sebesar 0,301 dikali dengan nilai zero order sebesar 0,782
 - $0,301 \times 0,782 = 0,235$ (23,5%)
 - $0,247 + 0,200 + 0,235 = 0,682$.

Pada hasil yang telah di jumlah kan maka dapat disimpulkan berarti ketiga variabel yakni variabel Kompetensi Aparatur X_1 , Sistem Informasi (SIMDA-BMD) X_2 , dan Tata Kelola X_3 berpengaruh secara parsial terhadap kualitas pengelolaan barang milik daerah.

Uji Signifikansi (Uji F)

F adalah uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi $< 0,050$ atau F-hitung $> F$ -tabel, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh secara simultan (bersama-sama) antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y).

Tabel 5. Hasil Uji-F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	701.810	3	233.937	65.781	.000 ^b
	Residual	327.180	92	3.556		
	Total	1028.990	95			

a. Dependent Variable: y

b. Predictors: (Constant), x3, x1, x2

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai-F hitung adalah sebesar 65,781 dengan signifikansi 0,00 yang berada dibawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel kompetensi aparatur, sistem informasi manajemen daerah (SIMDA-BMD), dan Tata Kelola berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan barang milik daerah.

Pembahasan berisi hasil-hasil temuan penelitian dan pembahasannya. Tuliskan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan harus ditunjang oleh data-data yang memadai. Hasil penelitian dan temuan harus menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian bagian pendahuluan. Sub judul pada pembahasan ditulis tanpa menggunakan nomor.

Setiap tabel dan gambar diberi judul dan sumber. Judul Tabel ditaruh di atas tabel. Judul gambar di taruh di bawah gambar. Penomoran judul tabel dan judul gambar berurutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data di publikasi pada bab IV maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengelolaan barang milik daerah pada pemerintah kota Palembang.
2. Sistem informasi manajemen daerah (SIMDA-BMD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengelolaan barang milik daerah pada pemerintah kota Palembang.
3. Tata Kelola berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengelolaan barang milik daerah pada pemerintah kota Palembang.
4. Kompetensi aparatur, sistem informasi manajemen daerah, dan Tata Kelola berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengelolaan barang milik daerah pada pemerintah kota Palembang dengan kontribusi sebesar

68,2%

Saran

Berdasarkan kesimpulan pada butir 5 maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat lebih mengoptimalkan potensi pada kompetensi aparatur yang sudah memberikan kontribusi sebesar 32,7%, untuk lebih meneliti pada bagian tertentu lainnya dalam variabel kompetensi aparatur, yang dalam hal ini merujuk pada latar belakang pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Maka dari itu untuk memperkuat kompetensi aparatur yang bermutu dibutuhkan sarana seperti mengadakan bimtek, serta mengikuti pelatihan yang dapat memberikan ilmu dalam meningkatkan kinerja terhadap kompetensi aparatur, sehingga ke depannya kompetensi aparatur dapat lebih membantu peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah yang bermutu.
2. Pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat sistem informasi manajemen daerah (simda-bmd) yang sudah memberikan kontribusi sebesar 22,6% untuk lebih memastikan perangkat yang dipilih pemerintah melaksanakan proses dalam pengelolaan barang milik daerah secara maksimal. Maka dapat ditingkatkan lagi pada hal ini dapat memberikan terobosan baru dalam aplikasi sehingga dapat lebih memudahkan dalam pengoperasian terhadap sistem informasi manajemen (simda-bmd) itu sendiri agar menghasilkan proses pencatatan pada kualitas pengelolaan barang milik daerah yang bermutu.
3. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola dimana pada penelitian ini telah memberikan kontribusi sebesar 30,1% didapat pada hasil tersebut untuk lebih ditingkatkan lagi dengan memperkuat dalam penerapan pada prinsip-prinsip *good governance* untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya publik, dan memperkuat hubungan dengan masyarakat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sebagai pengelola yang bertanggung jawab dan transparan.
4. Bagi peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk memperluas lagi ruang lingkup penelitian dengan mengkaji perilaku penyebab terjadinya faktor pada kompetensi aparatur, sistem informasi (SIMDA-BMD), dan tata kelola dengan objek peneliti yang lebih meluas lagi dalam konteks wilayah di kabupaten/kota pada provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astini, Y. (2018). Kualitas aparatur, sistem informasi, sistem pengendalian intern dan efektivitas manajemen aset tetap. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 13(2), 173-184.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (n.d.). *Laporan keuangan pemerintah pusat*. Retrieved from <https://www.bpk.go.id/lkpp>

- Ekayanti, A. R. M. I. (2018). Determinants effectiveness fixed asset management of district government on the island of Lombok. *International Journal of Business Management and Economic Research (IJBMER)*, 9(1), 1219-1229.
- Fahrurrozi, H., Akram, A., & Basuki, P. (2019). Pengaruh kualitas aparatur melalui SIMDA dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pengelolaan BMD. *E-Jurnal Akuntansi*, 27(1), 675-707. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i01.p25>
- Faisal. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset pemerintah. *Jurnal Akuntansi*, 1-16. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i10.p01>
- Gaffar, I., Hasanuddin, B., & Kusumawati, A. (2017). Pengaruh inventaris aset, sumber daya manusia terhadap optimalisasi aset dengan sistem informasi sebagai variabel moderasi. *Jurnal Analisis*, 6(2).
- Gunawan, H., Haming, M., Zakaria, J., & Djamareng, A. (2017). Effect of organizational commitment, competence, and good governance on employees' performance and quality asset management. *IRA-International Journal of Management & Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.21013/jmss.v8.n1.p3>
- Haura, G. A., Junita, A., & Meutia, T. (2019). Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), pengelolaan keuangan daerah, dan kinerja aparatur pemerintah daerah terhadap good governance. *Jurnal Penelitian Ekonomi*.
- Kementerian Dalam Negeri. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Daerah.
- Kurniati, T. A. B. S. (2020). Kemelut penatausahaan aset tetap (Dulu hingga kini). *Jurnal Akuntansi Multi Paradigma*, 2017, 1-19.
- Listiani, L., & Agustin, H. (2022). Pengaruh inventarisasi, kompetensi aparatur, dan pengendalian internal terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(4). <https://doi.org/10.24036/jea.v4i4.637>
- Nadia, L., & Budiarto, D. S. (2021). Pentingnya sistem informasi untuk pengelolaan barang milik daerah. *Akuntabel*, 18(2).
- Paranga, & Julesi. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Papua. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah)*, 5(1). <https://doi.org/10.52062/keuda.v5i1.1216>
- Pasalaran. (2001). Teori stewardship: Tinjauan konsep dan implikasinya pada akuntabilitas organisasi sektor publik. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 9(2).
- Pemerintah Kota Palembang. (n.d.). Wujudkan optimalisasi aset BPKAD Palembang sosialisasi ke 52 OPD. *Berita Musi*. Retrieved from <https://beritamusi.co.id/wujudkan-optimalisasi-aset-bpkad-palembang-sosialisasi-ke-52-opd/>

- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Pemerintah Republik Indonesia. (n.d.). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Rahmadhani, F., & Ariani, R. (2022). Kualitas aparatur, SIMDA-BMD, regulasi, dan pengendalian internal terhadap pengelolaan BMD. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS)*, 2(1). <https://doi.org/10.47233/jeps.v2i1.100>
- Ricardo, R., Astika, F., & Jepisah, D. (2022). Analisis faktor yang memengaruhi pengelolaan barang milik daerah (BMD) pada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 12(1). <https://doi.org/10.37859/jae.v12i1.3325>
- Syarifuddin, D. (2020). Analisis implementasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDAI) di Pemerintah Kabupaten Sarmi. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah)*, 5(2). <https://doi.org/10.52062/keuda.v5i2.1287>
- Utami, R. R., Aliamin, A., & Fahlevi, H. (2019). Analisis pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 5(2). <https://doi.org/10.24815/jped.v5i2.15662>
- Wibisono, A. F. (2017). Efektivitas peran BPKP dalam pembinaan dan pengawasan implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDAI). *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 7(1). <https://doi.org/10.22219/jrak.v7i1.09>
- Yunita, I., & Devitra, J. (2017). Analisis dan perancangan sistem informasi manajemen aset pada SMK Negeri 4 Kota Jambi. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi*, 2(1).